

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TEGAL

Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect tax revenues the city of Tegal for 20 years of observation, that is, since 1991th until 2010th. Types of data used in this research is the secondary data were obtained from the Bureau of Statistics Central (BPS), the Department of Revenue and Asset Management Areas (DPPAD) of Tegal. The Data retrieved is the data of receipt tax area, per-capita income, taxpayer, inflation, and economic growth.

Results of analysis showed that the per-capita income, taxpayers, and economic growth in the city of Tegal since 1991th until 2010th had a significant influence on the tax revenue in city of Tegal, while inflation did not influence significantly to tax revenues in the city of Tegal.

Keywords: Local Tax, Per-Capita Income, Taxpayer, Inflation, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah-daerah otonom, dituntut mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa tergantung pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007). Penerimaan PAD digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk itu setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

¹ Penulis penanggung jawab

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Adapun jenis-jenis pajak Daerah Tingkat I, antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kota Tegal terkenal dengan kota Bahari karena dekat dengan pantai termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian. Salah satu penerimaan daerah di Kota Tegal adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Tegal pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Dengan banyaknya sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah, maka Kota Tegal memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

Tabel 1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Tegal
Tahun 1991 – 2010 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Besarnya Kontribusi (%)
1991	3.257.342	620.782	19,06
1992	3.340.452	618.017	18,50
1993	3.959.430	1.076.157	27,18
1994	4.660.156	1.126.102	24,16
1995	5.110.656	1.236.667	24,20
1996	5.741.001	1.287.776	22,43
1997	5.470.797	1.433.392	26,20
1998	7.789.055	1.746.003	22,42
1999	8.042.959	2.003.497	24,91
2000	6.765.212	1.653.996	24,45
2001	17.492.294	2.778.700	15,89
2002	30.410.520	4.120.425	13,55
2003	35.147.566	5.168.265	14,70
2004	42.359.747	6.656.722	15,71
2005	58.725.985	7.557.370	12,87
2006	63.725.637	8.134.226	12,76
2007	58.869.585	7.801.608	13,25
2008	69.567.244	10.694.367	15,37
2009	90.480.877	11.910.295	13,16
2010	101.321.867	13.100.646	12,93

Sumber : Data BPS Kota Tegal (2010)

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Sebab salah satu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2006 tinggi yaitu sebesar Rp. 63.725.637 hal ini diikuti karena pajak daerah juga meningkat sebesar Rp. 8.134.226 Kontribusi yang paling banyak tercapai pada tahun 1993, yaitu 27,18 % kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai dengan tiga tahun terakhir. Banyak sedikitnya kontribusi pajak pada penerimaan pajak daerah berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak. Hal ini diperkuat dengan pendapat Lains (1985) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan oleh terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah, hal ini sebagai akibat dijadikannya pajak-pajak yang hasilnya besar sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga, tinggi rendahnya realisasi perolehan PAD sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya realisasi perolehan pajak daerah.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 1991 – 2010

Tahun	Wajib Pajak (Orang)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1991	295	447.584	9,35	3,88
1992	230	427.743	8,61	3,57
1993	340	533.828	7,70	3,78
1994	343	556.650	4,13	4,67
1995	693	651.571	4,73	4,04
1996	841	494.903	9,47	3,62
1997	654	532.913	11,29	4,58
1998	579	506.716	12,80	4,24
1999	530	868.484	8,93	4,79
2000	731	807.985	5,88	4,11
2001	1.205	1.444.138	7,45	4,81
2002	1.328	1.429.511	4,77	5,24
2003	2.286	1.502.980	7,44	4,77
2004	2.070	1.334.683	8,73	5,35
2005	2.622	1.389.217	8,11	5,39
2006	2.869	3.040.198	7,85	5,43
2007	2.615	3.194.698	7,26	5,36
2008	3.170	3.341.748	6,78	5,31
2009	3.568	3.488.546	7,60	5,99
2010	3.492	3.661.688	5,25	6,09

Sumber : Data BPS Kota Tegal (1991-2010)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa wajib pajak cenderung mengalami peningkatan, walaupun terjadi penurunan pada tahun 1997 sampai 1999 yang dikarenakan banyak industri yang bangkrut pada saat itu, tetapi pada tahunnya berikutnya wajib pajak terus meningkat hingga mencapai 3.492 orang pada tahun 2010 hal ini berarti bahwa bidang industri di Kota Tegal sudah mulai membaik dan pembayaran pajak dilakukan dengan tertib oleh wajib pajak. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 hal ini disebabkan karena para pekerja menuntut untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan perkapita di Kota Tegal mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 1994 mengalami penurunan sebesar Rp. 494.903 hal ini diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga mengganggu perkembangan ekonomi akibat jangka panjangnya ia mengganggu pendapatan perkapita. Kemudian persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal masih naik turun atau fluktuatif, dan pada tahun 2010

pertumbuhan ekonomi mencapai 6,09%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuatif sejak tahun 1993 sampai dengan 2010 dan belum mencapai prosentase tertinggi seperti di tahun 1993, yaitu 27,18%. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut guna menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Salah satu sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk mengefektifkan pajak daerah adalah dengan mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Penghasilan negara berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak, atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Jadi penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pemungutan pajak, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam kepentingan umum. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Wajib Pajak > 0 : Wajib Pajakn berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Semakin besar pendapatan masyarakat maka diharapkan akan menyebabkan kemampuan membayar pajak masyarakat menjadi semakin besar. Pada penelitian Agustiningtyas (2003) dibuktikan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk (Musgrave, 1989). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Perkapita > 0 : Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak semata berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pula pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dalam penelitian yang dilakukan Tamara (2009) menyimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Inflasi < 0 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sektor pajak memegang peranan dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam setiap pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian

yang akhirnya memperluas peningkatan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian Tamara (2009) menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pertumbuhan Ekonomi > 0 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penerimaan pajak daerah dijadikan sebagai variabel dependen. Untuk mempermudah pemahaman, variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Daerah yang disimbolkan dengan Y. Penerimaan pajak daerah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

Selain itu penelitian ini melibatkan empat variabel independen sebagai berikut:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berlokasi di Kota Tegal, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Kota Tegal. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan orang.
2. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tersebut. Data pendapatan perkapita dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.
3. Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya di Kota Tegal. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Data pertumbuhan ekonomi dihitung dari tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam satuan persen.

Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Penelitian mengenai pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi.

2. Deteksi Normalitas Data

Deteksi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data-data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai sig (p-value) > 0,05 menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Deteksi Normalitas Data dengan One Sample Kolmogrov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Wajib Pajak	Pendapatan perkapita	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pajak daerah
N		20	20	20	20	20
Normal Parameters ^a	Mean	6.9896	13.9212	2.0031	1.5459	14.8846
	Std. Deviation	.89714	.77415	.29072	.16348	1.00831
Most Extreme Differences	Absolute	.164	.164	.171	.150	.145
	Positive	.120	.164	.100	.092	.145
	Negative	-.164	-.153	-.171	-.150	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		.734	.734	.765	.669	.648
Asymp. Sig. (2-tailed)		.655	.655	.602	.761	.795
a. Test distribution is Normal.						

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil Deteksi Normalitas menunjukkan bahwa semua variabel berdistribusi normal. Nilai profitabilitas dari wajib pajak sebesar 0,655; pendapatan perkapita sebesar 0,655; inflasi sebesar 0,602; pertumbuhan ekonomi sebesar 0,761; dan penerimaan pajak daerah sebesar 0,795. Nilai profitabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi deteksi normalitas.

3. Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batasan dari *Tolerance Value* adalah 0.1. jika nilai *Tolerance Value* melebihi 0.1 maka terjadi gejala Multikolinieritas. Batasan dari nilai VIF adalah 10, jika VIF dari suatu variabel melebihi 10 berarti Multikolinieritasnya tinggi. Sebaliknya apabila nilai VIF dibawah 10 diasumsikan tidak terjadi Multikolinieritas (Imam Ghozali, 2009).

Tabel 4
Hasil Deteksi Multikolinieritas Data
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Wajib Pajak	.128	7.790
	Pendapatan perkapita	.108	9.249
	Inflasi	.881	1.135
	Pertumbuhan Ekonomi	.202	4.941

a. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil analisis deteksi multikolinieritas diperoleh untuk hasil VIF WP = 7,79, PKAPITA = 9,249, INF = 1,135 dan PEK = 4,941. Dari hasil pendeteksian diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel WP = 0,128, PKAPITA = 0,108, INF = 0,881 dan PEK = 0,202. Sehingga nilai dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF (*varians inflation factor*) kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin-Watson (*DW test*).

Tabel 5
Hasil Deteksi Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.981	.976	.15508	2.082

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Wajib Pajak, Pendapatan perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah

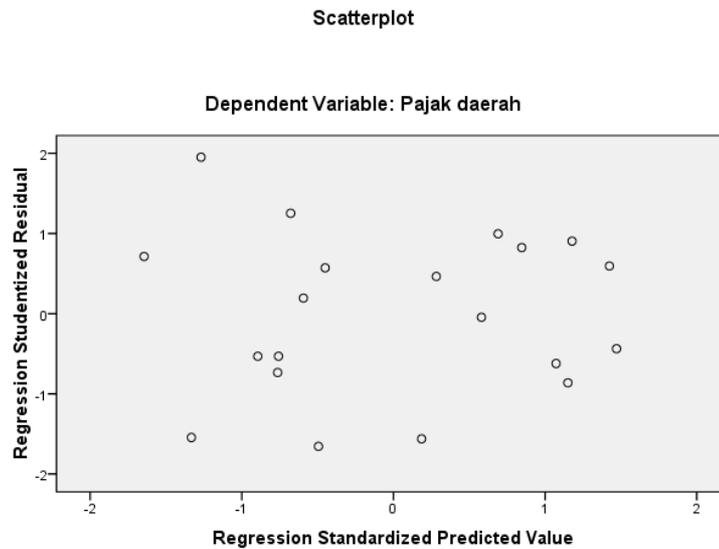
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Deteksi autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson (DW) pada kolom Durbin Watson diperoleh hasil hitung DW = 2,082 sedangkan besarnya nilai DW tabel diperoleh nilai d_L (batas bawah) = 0,894 dan d_U (batas atas) = 1,828. Bila nilai DW hitung terletak diantara (d_U) dan ($4-d_U$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi deteksi autokorelasi (Ghozali, 2009:99). Dari hasil analisis data diperoleh nilai DW hitung (2,082) yang terletak diantara d_U (1,828) dan $4-d_U$ (2,172) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi deteksi autokorelasi.

5. Deteksi Heteroskedastisitas

Pendeteksian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dan variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *disturbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi.

Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mendeteksinya adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya SRESID sebagai (Y). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).



Gambar 1
Hasil Deteksi Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya SRESID sebagai (Y) diketahui tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk dipakai karena telah memenuhi deteksi heteroskedastisitas.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dimana dalam analisis regresi tersebut akan menguji pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pengolahan data menggunakan bantuan program komputer SPSS berdasarkan data-data yang diperoleh dari 20 sampel penelitian yang dilakukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara parsial maupun simultan. Dalam hal ini semua variabel penelitaian ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln). Hal ini sesuai dengan model fungsi produksi. Penggunaan transformasi Ln dilakukan untuk menghasilkan data yang normal karena data asli tidak memiliki range (jangkauan data) dan standar deviasi yang besar yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal.

Tabel 6
Analisis Regresi Pengaruh Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.467	1.246		2.784	.014
Wajib Pajak	.618	.111	.550	5.580	.000
Pendapatan perkapita	.312	.140	.239	2.229	.042
Inflasi	.201	.130	.058	1.542	.144
Pertumbuhan Ekonomi	1.527	.484	.248	3.157	.007

a. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas WP = 0,618 , PKAPITA = 0,312, INF = 0,201, PEK = 1,527 dengan konstanta sebesar 3,467, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{Ln.Y} = 3,467 + 0,618 \text{ Ln.X}_1 + 0,312 \text{ Ln.X}_2 + 0,201 \text{ Ln.X}_3 + 1,527 \text{ Ln.X}_4$$

Model regresi tersebut mengandung arti :

- Nilai konstan (Y) sebesar 3,467 yang berarti bahwa jika wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sama dengan nol maka pendapatan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 3,467.
- Koefisien regresi wajib pajak didapat 0,618 yang berarti setiap peningkatan wajib pajak sebesar 1 orang maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,618.
- Koefisien regresi pendapatan perkapita didapat 0,312 yang berarti setiap peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp. 1 maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,312.
- Koefisien regresi inflasi didapat 0,201 yang berarti setiap peningkatan inflasi sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,201.

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi didapat 1,527 yang berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 1,527.

7. Deteksi T

Deteksi hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat baik secara parsial. Hasil analisis deteksi hipotesis antara variabel bebas X₁, X₂, X₃ dan X₄ terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7
Hasil Deteksi Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	3.467	1.246		2.784	.014			
Wajib Pajak	.618	.111	.550	5.580	.000	.975	.822	.197
Pendapatan perkapita	.312	.140	.239	2.229	.042	.951	.499	.079
Inflasi	.201	.130	.058	1.542	.144	-.161	.370	.054
Pertumbuhan Ekonomi	1.527	.484	.248	3.157	.007	.919	.632	.111

a. Dependent Variable:
Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil uji t menyatakan bahwa t_{tabel} sebesar 2,131 didapat dari alpha = 0,05 artinya kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

8. Deteksi F

Deteksi statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Hasil Deteksi Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.956	4	4.739	197.055	.000 ^a
	Residual	.361	15	.024		
	Total	19.317	19			

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Wajib Pajak, Pendapatan perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil pengujian pada tabel di atas, deteksi simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F_{tabel} didapat dari $df_1 = 4$ dan $df_2 = 15$ dengan $\alpha = 0,05$ artinya kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 197,055 dikarenakan nilai F_{hitung} ($197,055$) > F_{tabel} ($3,055$) atau besarnya probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan pajak daerah sebagai variabel terikat.

9. Koefisien Determinasi

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Tabel 9
Hasil Deteksi R^2 dengan Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.981	.976	.15508

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Wajib Pajak, Pendapatan perkapita

b. Dependent Variable: Pajak daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Dari hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,976. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keempat variabel independen yaitu wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variasi variabel penerimaan pajak daerah adalah sebesar 97,6% sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Musgrave and Musgrave (1989) dan Anwar Ahah (1994) menyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin banyak wajib pajak maka semakin besar penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain wajib pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita daerah, untuk itu pendapatan perkapita daerah juga memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan

PAD. Lajunya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap pajak, sebab semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan pajak daerah. Hal ini berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahwa wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang berarti bahwa apabila wajib pajak mengalami kenaikan, maka nilai penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan juga. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian). Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang berarti bahwa apabila pendapatan perkapita mengalami kenaikan, maka nilai penerimaan pajak daerah juga akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. BPS (2000) mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang. Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. faktor masalah sosial yang muncul dari inflasi yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (*stagnan*) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region, yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia Kota Tegal.

Hasil deteksi t dari penelitian ini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang berarti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka nilai penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2009), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Bandung dari tahun 1999-2008 menyimpulkan bahwa Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri di Kota Bandung mempunyai pengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung. Tingkat inflasi di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah. Jumlah penduduk, inflasi, serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat mengambil simpulan bahwa terdapat pengaruh positif wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti semakin tinggi wajib pajak semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar pendapatan perkapita maka akan semakin besar pula penerimaan pajak daerah. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti besar kecilnya inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat saran, yaitu jumlah wajib pajak meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka dari itu diharapkan masyarakat dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Anggaran pemerintah daerah sebaiknya digunakan untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, karena memberikan dampak yang baik untuk penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Tahun 1998-2001). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Badan Pusat Statistik. 1991-2010. *Tegal Dalam Angka*. BPS Kota Tegal: Tegal.
- Guritno Mangkusunroto. 1993. *Ekonomi Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Hutagaol, John., Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. 6, No. 2, h. 186-193.
- Judisseno, Remsky K. 1997. *Pajak dan strategis Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- Koswara, E. 2000. Paradigma Baru Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepentingan Rakyat. *Dalam jurnal Widayapraja*. Tahun XXXIV No. 34. Jakarta
- Lains, Alfian. 1985. Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru. *Majalah Prisma* No. 4 Tahun XIV hal 40-57.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Muara Nanga. 2001. *Edisi Perdana Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Munawir Ismail. 2001. *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang
- Musgrave, Richard A. And Peggy B. Musgrave. 1989. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Erlangga: Jakarta.
- Nugradi, Eko Wahyu dan Aisma Syamsi. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Kota Medan. *Jurnal Visi Ekonomi*. Vol. 10 No. 01.

- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres: Yogyakarta.
- Rostow, W.W. 1960. *The Stages of Economic Growth : A Non - Communist Manifesto*. Cambridge University Press: Cambridge
- Sadono Sukirno. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persad : Jakarta.
- _____2005. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____2007. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT. Eresco: Bandung.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Suhendi, Eno. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Suparmoko. 1986. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. BPFE: Yogyakarta.
- Sutrisno. 2002. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Sutrisno PH. 1998. *Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 2, h.162-173.
- Tamara, Arshad Darulmalshah. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, h. 151-172.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi I Edisi Kelima*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro, Michael P. Smith, Stephen C. 2006. *Economic Development, Ninth Edition*. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.L. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kesembilan*. Erlangga: Jakarta.
- Wahyu Widayat. 2000. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen: STIE YKPN*.
- Wantara, Agus. 1997. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970-1992). *Kinerja-Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Program Pasca Sarjana Universitas atmajaya Yogyakarta No. 2/Januari 1997, hal. 41-60. Yogyakarta.
- Widhiastuti, Nawang Astaning. 2000. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 1987-1988. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya*.